



BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SEMARANG

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang (LKj Balai KIPM Semarang) triwulan II tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Semarang dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Semarang Tahun 2025. Secara umum, pada triwulan II tahun 2025 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Semarang di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Semarang, 02 Juli 2025

Pt. Kepala Balai KIPM Semarang,

Sarwan, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET DAN PERENCANAAN KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	8
2.1 CAPAIAN KINERJA	8
2.2 REALISASI ANGGARAN	38
BAB III PENUTUP	40
3.1 KESIMPULAN	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard capaian IK pada sistem aplikasi kinerja	8
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2025	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2025	4
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Triwulan II Tahun 2025	9
Tabel 3. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan II Tahun 2025	12
Tabel 4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan II Tahun 2025	16
Tabel 5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan II Tahun 2025	18
Tabel 6. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan II Tahun 2025	19
Tabel 7. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan II Tahun 2025	22
Tabel 8. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan II Tahun 2025	26
Tabel 9. Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan II Tahun 2025	31
Tabel 10. Target dan Realisasi IK 16 pada Triwulan II Tahun 2025	33
Tabel 11. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II 2025	39
Tabel 12. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan II 2025	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang pada Triwulan II 2025 adalah sebesar 109.61%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Semarang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2025 telah ditetapkan IK/IKU berjumlah 16 yang terbagi dalam 3 kegiatan yaitu:
 - a. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan;
 - b. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar;
 - c. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Uraian IK/IKU pencapaiannya memenuhi/tetap dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu:
 - IK 1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)
 - IK 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)
 - IK 3 Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Bali KIPM Semarang (Lokasi)
 - IK 4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

- IK 5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 9 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)
- IK10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)
- IK 11 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)
- IK 13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)
- IK 14 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)
- IK 15 Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)
- IK 16 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)

Kinerja keuangan Balai KIPM Semarang triwulan II tahun 2025 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,098,970,000,- realisasi anggaran pada triwulan II mencapai Rp. 1,710,776,388,- atau sebesar 24,10 %

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BKIPM Semarang. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Semarang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas,

Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai KIPM Semarang dibantu oleh 1 Pejabat Struktural yaitu Kepala Sub Bagian Umum (Tim Kerja Dukungan Manajerial), dan 3 Tim Kerja yaitu Pengendalian dan Pengawasan Mutu produksi Primer, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Pascapanen, Manajemen Mutu.

SASARAN, INDIKATOR, TARGET DAN PERENCANAAN KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai KIPM Semarang selama Tahun 2025. Capaian kinerja (performa results) Balai KIPM Semarang tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum Balai KIPM Semarang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Tahun 2025.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 109.61 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU/IKM) Balai KIPM Semarang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2025 terjadi perubahan indikator kinerja Balai KIPM Semarang menjadi 16 (enam belas) yang terbagi dalam 3 (tiga) sasaran Kinerja yaitu :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Sedangkan uraian indikator dan target kinerja pada Balai KIPM Semarang tahun 2025 yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2025

SASARAN TRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	%	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan	%	70

			keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)		
		3.	Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Bali KIPM Semarang (Lokasi)	Lokasi	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	%	99
2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai	Nilai	75

			KIPM Semarang (Nilai)		
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	71.50
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	%	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	Indeks	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan	%	85

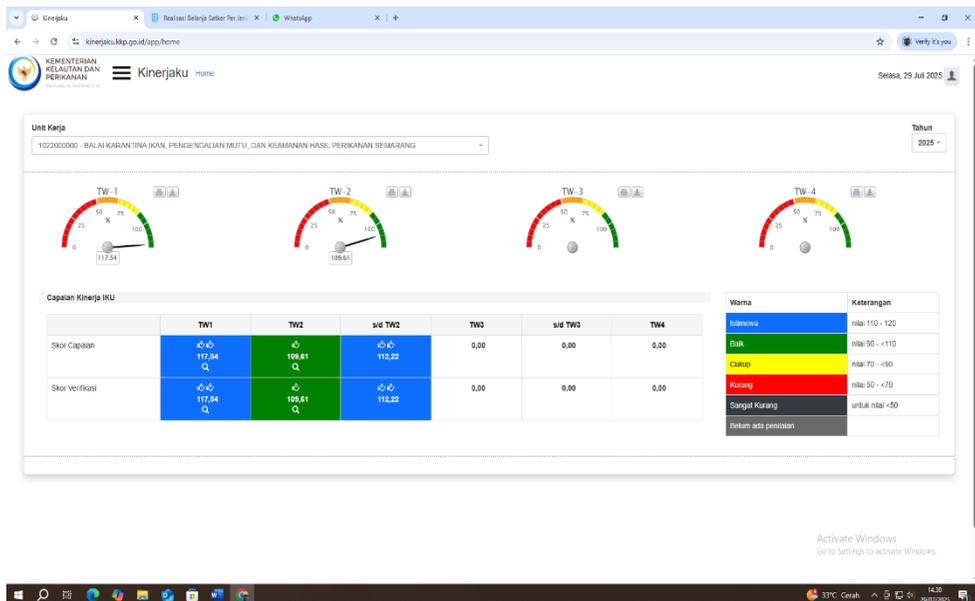
			Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)		
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	%	76
		14.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	75
		15.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	Nilai	1
		16.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	Nilai	88

BAB 2

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Semarang pada triwulan II 2025 masuk dalam kategori “istimewa”, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 109,61 %, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 1. Dashboard capaian IK pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Triwulan II Tahun 2025

SASARAN TRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	0	0
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	70	96,25
		3.	Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	1	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	99	99,90
2.	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT	0	

	mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar		Balai KIPM Semarang (Nilai)		
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	0	
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	85	99,56
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	0	
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	0	
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	75	84,18
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	0	
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	85	97,92
		13.	Persentase rencana	76	100

			umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)		
		14.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	0	0
		15.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	0	0
		16.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	88	90,84

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Target dan realisasi kinerja triwulan II pada Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan II Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahun nan		
Target	0	70	70	0	0	0	0		70
Realisasi	0	96,25	96,25	0	0	0	0		
% Capaian	0	120	120	0	0	0	0		

Definisi

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang meliputi: Sertifikat PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu system manajemen keamanan pangan yang didasarkan pada Tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi manusia atau konsumen.

Tata Kelola yang diberlakukan dalam penerapan system HACCP yaitu: Pertama, fase In Process Inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan.

Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021.

Sertifikasi HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan

makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis And Critical Control Point* (HACCP).

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

1. Capaian pada semester 1 ini berasal dari 36 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup maupun perpanjangan. Berdasarkan peningkatan data yang signifikan terhadap ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah UPI dan adanya penambahan UPI di tahun 2025 di wilayah Jawa Tengah. Dari jumlah sertifikat yang diterbitkan sampai akhir triwulan II sebanyak 122 sertifikat yang terbit.
2. Capaian lainnya berdasarkan Persentase terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan pada Unit pengolahan ikan skala UMKM dan Menengah besar pada semester 1 tercapai 90.83 % dengan jumlah sertifikat terbit sebanyak 218 sertifikat (72 pemohon) dari 240 Rekomendasi (81 pemohon).
3. Capaian IKU diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

- % X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP/SSOP
- xn = Jumlah unsur pembentuk (2)

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yang ada di UPT

$$\% A = \frac{122}{120} \times 100\% = 101.67 \%$$

$$\% B = \frac{218}{240} \times 100\% = 90.83 \%$$

$$\% X = \frac{101.67 + 90.83}{2} \times 100\% = 96.25 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka capaian kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%) sebesar 96,25 %

IK 3. Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)

Target dan realisasi kinerja triwulan II pada Lokasi Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan II Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target	0	1	1	0	0	0	0		1
Realisasi	0	1	1	0	0	0	0		
% Capaian	0	100	100	0	0	0	0		

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

- Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar modern, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic
- Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji

Cara Penghitungan

Menghitung jumlah kab/kota yang menjadi lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Kegiatan pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produsen pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Semarang ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2025 dengan lokasi pengawasan di Pasar Modern Superindo Kedung Mundu Semarang. Lokasi ini merupakan salah satu tujuan konsumen ikan oleh masyarakat yang ramai dikunjungi dan menyediakan ikan segar konsumsi. Pelaksanaan pengawasan ini berjalan lancar tidak ada kendala.

Kegiatan dilaksanakan pada sentra-sentra penyedia pangan sehat di Supermarket Superindo Kedung Mundu di Kota Semarang – Provinsi Jawa Tengah Salah satu lokus kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik adalah : Supermarket Superindo Kedung Mundu Semarang dengan jenis sampel : a. Ikan Salem b. Ikan Tongkol c. Ikan Bawal Hitam d. Ikan Kerapu e. Ikan Kakap Merah Kegiatan pengawasan ini dilakukan melalui observasi lapangan dengan melihat kesesuaian terhadap sarana dan prasarana yang tersedia, penerapan prosedur sanitasi, cara penanganan ikan yang baik, melakukan pengecekan suhu ikan, dan pengambilan sampel.

Sampel ikan yang diambil dilakukan pengujian laboratorium antara lain : Organoleptik / Sensori, Mikrobiologi (ALT, dan Escherichia Coli, Salmonella sp), di Laboratorium Balai KIPM Semarang. Sedangkan untuk pengujian Kimia (Formalin) dilakukan pengujian di lokasi Superindo Kedung Mundu oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Kegiatan pengawasan ini sangat strategis karena dilaksanakan bersama Dinas/Instansi terkait seperti: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang Dinas Perikanan Kota Semarang Dinas Perdagangan Kota Semarang Satpol PP Kota Semarang BPOM Kota Semarang Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Halal Center UIN Walisongo Semarang Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Kantor LP2K Jawa Tengah BPPMHKP Semarang.

Hasil perhitungan untuk persentase jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Superindo Kedung Mundu Semarang Semester I Tahun 2025 menyatakan bahwa jaminan mutu keamanan produk perikanan di Superindo Kedung Mundu Semarang pada Semester I Tahun 2025 adalah 94,4 % dlm Kriteria yang Memenuhi Persyaratan, sedangkan 5,6' % dalam Kriteria yang Belum Memenuhi Persyaratan (hasil perhitungan terlampir).

IK 4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Tabel 5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan II Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahu nan		
Target	0	99,00	99,00	0	0	0	0		99,00
Realisasi	0	99,90	99,90	0	0	0	0		
% Capaian	0	100,91	100,91	0	0	0	0		

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Cara Penghitungan

$$x = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

1. Capain ini berasal dari penerbitan SMKHP sebagai persyaratan ekspor komoditas perikanan ke Negara Tujuan.
2. Capain indicator diperoleh dengan menghitung rata – rata prosentase capaian penerbitan sertifikat dari seluruh UPI
3. Realisasi terhadap IKU persentase kebertrimaan system jaminan mutu di negara tujuan ekspor sebesar 99,9 %.
4. Terjadi 1 kasus penolakan ekspor ke negara Jepang dengan alasan Spesifikasi komoditas yang dikirim tidak sesuai dengan permintaan buyer
5. Capain IKU ini diperoleh dengan perhitungan sebagai mana terlampir

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)

Tabel 6. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan II Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target		85	85	0	0	0	0		85
Realisasi		99,56	99,56	0	0	0	0		
% Capaian		117,13	117,13	0	0	0	0		

Keterangan :

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

IKPA adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Ini adalah alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga. IKPA mengukur tiga aspek utama: kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari anggaran.

Isu utama dalam pelaksanaan anggaran yang berdampak pada IKPA biasanya terkait dengan aspek berikut:

a. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Penyebab: Perencanaan tidak matang, keterlambatan penyusunan HPS, atau revisi perencanaan berulang.

Dampak: Realisasi anggaran terlambat, serapan rendah di awal tahun

b. Penyerapan Anggaran Tidak Merata

Penyebab: Beban kerja menumpuk di akhir tahun, tidak adanya pelaksanaan kegiatan secara triwulanan.

Dampak: Terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun, berisiko tidak tercapainya target IKPA bulanan/triwulanan.

c. Revisi DIPA yang Sering dan Terlambat

Penyebab: Perubahan kebijakan, perencanaan awal tidak akurat.

Dampak: Gangguan pada pelaksanaan kegiatan, keterlambatan penyaluran dana.

d. Kesalahan SPM atau Retur

Penyebab: Verifikasi yang kurang cermat, ketidaksesuaian dokumen pendukung.

Dampak: Terhambatnya proses pencairan dana, mempengaruhi nilai indikator kualitas pelaksanaan anggaran.

e. Kinerja Penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)

Bendahara yang Lambat

Penyebab: Pengumpulan dokumen tidak tepat waktu, kendala SDM atau sistem.

Dampak: Penilaian IKPA untuk indikator ketepatan waktu LPJ turun.

Implikasi terhadap IKPA

IKPA adalah alat ukur untuk menilai **kinerja pelaksanaan anggaran** suatu satuan kerja (satker). Dampak isu-isu di atas terhadap IKPA antara lain:

Isu	Indikator IKPA Terdampak	Dampak
Keterlambatan pengadaan	Penyerapan anggaran Deviasi Halaman III DIPA	Nilai IKPA turun karena penyerapan rendah
Penyerapan tidak merata	Penyerapan anggaran	Kinerja dianggap tidak optimal
Revisi DIPA terlambat atau sering	Revisi DIPA	Nilai indikator Revisi DIPA menurun
Kesalahan SPM/Retur	Kesalahan SPM	Meningkatkan rasio retur, menurunkan IKPA
LPJ lambat	Ketepatan Waktu LPJ	Nilai indikator LPJ turun, berpotensi teguran

Cara Penghitungan:

Berikut adalah komponen IKPA beserta bobotnya sesuai aplikasi monitoring evaluasi IKPA:

No.	Komponen IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	10
3	Penyerapan Anggaran	10
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP/TUP	10
7	Capaian Output	25
	TOTAL	100%

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang
(Indeks)

Tabel 7. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan II Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target	0	75	75	0	0	0	0		75
Realisasi	0	84,18	84,18	0	0	0	0		
% Capaian	0	112,24	112,24	0	0	0	0		

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi
- b. Kompetensi
- c. Kinerja
- d. Disiplin

1. Kualifikasi : berdasarkan Riwayat Pendidikan format terakhir yang dicapai

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SP/SD	1

2. Kompetensi : berdasarkan riwayat pengembangan kompetensi yang dilaksanakan

3.

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompenesi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompete nsi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim	15	-	-
0	Tidak pernah ikut diklat pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5

1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut seminar	10	10	17.5
0	Tidak pernah Ikut seminar	0	0	0
Total Mengikuti Kompetensi		40	40	40

4. Kinerja : berdasarkan penilaian prestasi kerja

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 sd kebawah	1

5. Disiplin : Berdasarkan Riwayat penjatuhan hukuman disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak pernah mendapat hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapat hukuman disiplin Tingkat ringan	3
S	Pernah mendapat hukuman disiplin Tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Tingkat berat	1

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/ dokumentasi

Nilai IP ASN Balai KIPM Semarang Triwulan II (Semester 1) pertanggal 15 Juli 2025 pada dashboard IP ASN KKP melalui domain <https://ipas.sdmao.id/> sebesar 84.18 (kategori tinggi), terdiri dari :

- a. Kualifikasi sebesar 23.33
- b. Kompetensi sebesar 30.84
- c. Kinerja sebesar 25
- d. Disiplin sebesar 5

Berikut data hasil perhitungan capaian Indeks profesionalitas ASN pada domain tersebut diatas:



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
16	BALAI KIPM SEMARANG	30	23.33	93.33%	30.84	77.1%	25	83.33%	5	100%	84.18	TINGGI
17	BALAI KIPM BAKURAHMAN	14	20.79	87.6%	33.14	82.85%	25	83.33%	5	100%	84.93	TINGGI

Distribusi nilai IP ASN Balai KIPM Semarang berdasarkan capaian unit organisasi adalah sebagai berikut :

No	Nama	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Ket
1	Yuni Awalusi	25	25	25	5	80	Sedang
2	Addeentya Garnedraswari	25	35	25	5	90	Tinggi
3	Sudarmawan	20	32.75	25	5	82.75	Tinggi
4	Yani Sukparwanti	25	30	25	5	85	Tinggi
5	Hening Anindiaswasti	25	35	25	5	90	Tinggi
6	Ariefah Prihastari	25	35	25	5	90	Tinggi
7	Yudha Kiswanto	25	20	25	5	85	Tinggi
8	Utami Dewi Aprilyani	25	20	25	5	75	Sedang
9	Agus Priyantoro	25	25	25	5	80	Sedang
10	Dewi Puspitasari	25	20	25	5	75	Sedang
11	Mutiara Rinasih	25	20	25	5	75	Sedang
12	Budi Nur Effendi	20	30.25	25	5	80.25	Sedang
13	Titis Candra Dewi	25	30	25	5	85	Tinggi
14	Neni Erawati	25	35	25	5	90	Tinggi
15	Sarwan	25	35	25	5	90	Tinggi
16	Agus Widjanarko	25	34.75	25	5	89.75	Tinggi
17	Ariyani Setianing Asih	20	35	25	5	85	Tinggi
18	Ely Musyarofah	20	35	25	5	85	Tinggi
19	Slamet Hariyono	20	35	25	5	85	Tinggi
20	Tri Hidayanti	20	35	25	5	85	Tinggi
21	Yudhi Yuliantoro	20	30	25	5	80	Tinggi

22	Heriawan Maulana	20	32.5	25	5	82.5	Tinggi
23	Nanik Windarti	25	30	25	5	85	Tinggi
24	Ratna Yuliasuti	25	30	25	5	85	Tinggi
25	Mochammad Zainil Achyar	25	30	25	5	85	Tinggi
26	Ika Nur Putriantini	25	30	25	5	85	Tinggi
27	Tri Atmo Adisucipto	20	35	25	5	85	Tinggi
28	Restu Febryani Lestari	20	35	25	5	85	Tinggi
29	Benny Puspojaji	25	30	25	5	85	Tinggi
30	Wakhid Maristy Islamanda K	25	30	25	5	85	Tinggi

Pengukuran nilai IP ASN Balai KIPM Semarang terintegrasi dengan peremajaan data pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN dengan memperhatikan penyesuaian bobot dimensi sebagaimana lampiran lampiran surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 tanggal 20 Juni 2024.

Peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN masing-masing pegawai diperlukan sebagai salah satu dimensi yang mempengaruhi nilai capaian IP ASN, terdapat perubahan perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional pada saat pegawai melakukan *update* data riwayat sertifikasi di menu “kursus” dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

IK 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Tabel 8. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan II Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target	85	85	170	0	0	0	0		85
Realisasi	100	97,92	197,92	0	0	0	0		
% Capaian	117,65	115,20	116,42	0	0	0	0		

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) menjadi hal krusial dalam menjaga kualitas pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemerintahan, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses ini bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di berbagai unit kerja. TLHP sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi atau saran hasil pengawasan diimplementasikan dengan tepat demi tercapainya tujuan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Sehingga terdapat korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PerMenKP) Nomor 7/PERMEN-KP/2021, pimpinan unit kerja diwajibkan menyampaikan rencana aksi dan merealisasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan hasil pengawasan Itjen KKP. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan Itjen, semua tindak lanjut ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah laporan diterima, baik secara manual maupun elektronik melalui sistem informasi yang telah disediakan.

Untuk memastikan tindak lanjut dilakukan dengan baik, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP secara periodik memantau implementasinya melalui aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK). Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Balai KIPM Semarang sampai dengan waktu pengukuran.

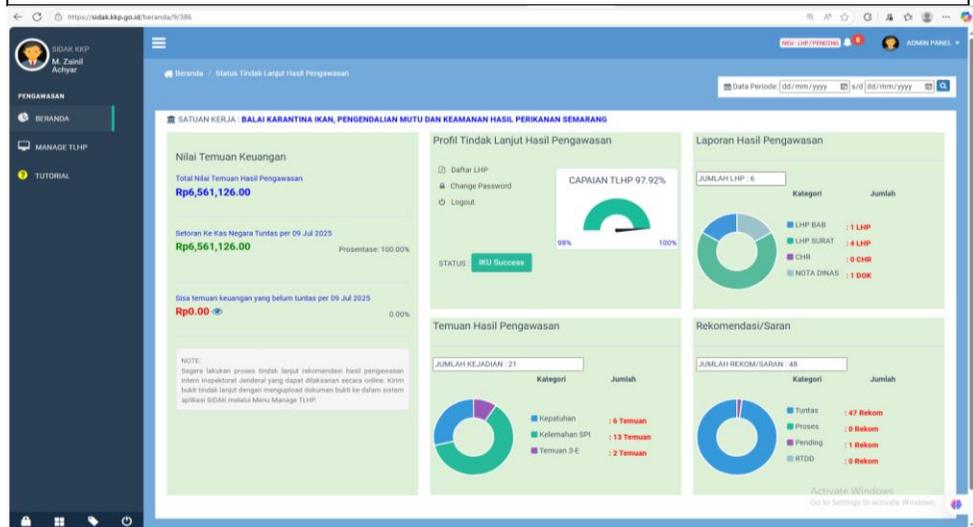
Cara Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Balai KIPM Semarang}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Balai KIPM Semarang}} \times 100$$

Rician kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Adapun pada periode Triwulan II tahun 2025, terdapat kegiatan pemantauan/pengawasan dari APIP terhadap Balai KIPM Semarang. Rekomendasi yang terdapat pada kegiatan periode Triwulan II telah ditindak lanjuti hingga TLHP mencapai 80 %. Berikut rangkuman kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan:

No	Instansi Pemeriksa/Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan/Pemantauan	Tanggal LHP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti
1	Inspektorat Jenderal KKP	B. 162/I/TJ.4/HP. 430/VI/2025	13 Juni 2025	5	4,9
JUMLAH					
CAPAIAN IKU ini				97,92	
$\text{Perhitungan IKU} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Telah Tuntas Ditindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100 = \frac{4,896}{5} \times 100 = 97,92$					



LAPORAN KINERJA BALAI KIPM SEMARANG TRIWULAN II

https://sidak.kipm.go.id/hasil-pengawasan/3/356/3728

Unit Organisasi: **SKAD KIPM M. Zaid Achyar**

Unit Kerja: **SKAD KIPM M. Zaid Achyar**

BERANDA

MANAGE TLHP

TUTORIAL

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada Balai PPMKHP Semarang

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG / 44961

Nama: **JAKA BARAT**

Jabatan: **Sarwan, S. P., M.Si**

NP: **PK Kepala BPPMHP Semarang**

NIK: **7191113799031002**

Milikan Kerja: **Ya** / **No file chosen**

Jumlah Temuan: 1 Temuan

Jumlah Rekomendasi: 2 Rekomendasi

Nilai Keunggulan: Rp0.00

Nilai Sistem Keunggulan (Rp): Rp0.00

Status: **PENDING**

Presentase Tidak Lajut: 00.00%

TUNTAS: 4 Rekomendasi

PROSES: 2 Rekomendasi

PENDING: 1 Rekomendasi

Sisa Nilai Keunggulan: Rp0.00

Profil TLHP: **Tim LHP ITJEM**

ID	Judul Temuan	Rekomendasi	% Tidak Lajut	Status	Aksi
12817	Aspek pelayanan yang memuatlah perhatian dan langkah perbaikan, antara lain: 1. Aspek Kelengkapan Pelayanan 1) Standar Pelayanan (SP) belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaannya, 2) Pelaksanaan Forum Komunitas Publik (FKP) belum dilakukan dengan Berbasis Acara FKP Penetapan SP sesuai Surat Edaran Menteri PKN dan RB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan FKP di lingkup instansi Pemerintahan, 3) Pelayanan ulang SP secara berkala belum mengoptimasi saran dan masukan dari hasil SIM, 4) Belum seluruh rekomendasi hasil SIM ditindaklanjuti secara tertata 1 bulan setelah laporan SIM ditandatangani, 5) Aspek Profesionalisme SDM melakukan waktu pelayanan belum menunjukkan penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan pada hari kerja dan penambahan waktu layanan di luar hari kerja secara rutin, 6) Aspek Sarana dan Prasarana Prasarana tergesa-gesa tidak terdapat jalan lapud memiliki tanggapan lebih dari 6 minggu dengan dan gantung block belum mengijinkan seluruh jalur akses pengguna jasa dilalui, 7) Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik Pemeliharaan data dan informasi pelayanan publik dalam kanal digital belum dilakukan rutin secara harian, 8) Aspek Informasi Tambahan Belum tersedia sistem arahan pelayanan secara daring, serta mesin arahan dan monitor arahan yang tersedia tidak dipergunakan/dimutakhirkan.	2	80.00	PROSES	Kelola Temuan

Showing 1 to 1 of 1 entries

SISTEM INFORMASI DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERNI

VERSION: 3.21, Tanggal By: C.131113

https://sidak.kipm.go.id/hasil-pengawasan/3/356/3728/12817

Unit Organisasi: **SKAD KIPM M. Zaid Achyar**

Unit Kerja: **SKAD KIPM M. Zaid Achyar**

BERANDA

MANAGE TLHP

TUTORIAL

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Data Periode: 01-Jan-2019 s.d 09-Jul-2025

Jumlah Laporan: 16 Dokumen

Jumlah Temuan: 21 Temuan

Jumlah Rekomendasi: 45

Nilai Keunggulan: Rp5.51.125

Tuntas: 47 Rekomendasi

Proses: 3 Rekomendasi

Pending: 1 Rekomendasi

Sisa Nilai Keunggulan: Rp0

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
3728	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Evaluasi	B.162/ITJ.AHP/04/V/2025	2025-05-13	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada Balai PPMKHP Semarang	PROSES	Detail
3408	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Pemantauan	B.430/ITJ.AHP/30/V/2024	2024-11-13	Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan dan PKL TA 2024 serta Pemantauan Tingkat Lajut Temuan yang di pel pada BPPMHP Semarang	TUNTAS	Detail
1968	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Audit	B.130/ITJ.AHP/180/V/2022	2022-07-15	Hasil Audit Kinerja pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang Provinsi Jawa Tengah TA 2021/2022	TUNTAS	Detail
1072	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Evaluasi	T.1069/ITJ.AHP/03/X/2021	2021-10-25	Hasil Evaluasi Implementasi Pelayanan Publik pada Balai KIPM Semarang di Provinsi Jawa Tengah	TUNTAS	Detail
1405	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Evaluasi	B.151/ITJ.AHP/40/V/2021	2021-08-02	Hasil Evaluasi Sistem Akreditasi Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang	TUNTAS	Detail
1212	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Pemantauan	2.2/ITJ.AHP/150/V/2021	2021-02-02	Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pelayanan Barang Jasa TA 2021 di Balai KIPM Semarang	TUNTAS	Detail

Showing 1 to 6 of 6 entries

SISTEM INFORMASI DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERNI

https://sidak.kipm.go.id/hasil-pengawasan/3/356/3728/12817/24817

Unit Organisasi: **SKAD KIPM M. Zaid Achyar**

Unit Kerja: **SKAD KIPM M. Zaid Achyar**

BERANDA

MANAGE TLHP

TUTORIAL

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada Balai PPMKHP Semarang

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG / 44961

Nama: **JAKA BARAT**

Jabatan: **Sarwan, S. P., M.Si**

NP: **PK Kepala BPPMHP Semarang**

NIK: **7191113799031002**

Milikan Kerja: **Ya** / **No file chosen**

Judul Temuan: **Aspek pelayanan yang memuatlah perhatian dan langkah perbaikan, antara lain: 1. Aspek Kelengkapan Pelayanan 1) Standar Pelayanan (SP) belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaannya, 2) Pelaksanaan Forum Komunitas Publik (FKP) belum dilakukan dengan Berbasis Acara FKP Penetapan SP sesuai Surat Edaran Menteri PKN dan RB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan FKP di lingkup instansi Pemerintahan, 3) Pelayanan ulang SP secara berkala belum mengoptimasi saran dan masukan dari hasil SIM, 4) Belum seluruh rekomendasi hasil SIM ditindaklanjuti secara tertata 1 bulan setelah laporan SIM ditandatangani, 5) Aspek Profesionalisme SDM melakukan waktu pelayanan belum menunjukkan penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan pada hari kerja dan penambahan waktu layanan di luar hari kerja secara rutin, 6) Aspek Sarana dan Prasarana Prasarana tergesa-gesa tidak terdapat jalan lapud memiliki tanggapan lebih dari 6 minggu dengan dan gantung block belum mengijinkan seluruh jalur akses pengguna jasa dilalui, 7) Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik Pemeliharaan data dan informasi pelayanan publik dalam kanal digital belum dilakukan rutin secara harian, 8) Aspek Informasi Tambahan Belum tersedia sistem arahan pelayanan secara daring, serta mesin arahan dan monitor arahan yang tersedia tidak dipergunakan/dimutakhirkan.**

Rekomendasi: **3030E**

Nilai Keunggulan (Rp): 0.00

Nilai Sistem Keunggulan (Rp): 0.00

Status: **PENDING**

Tanggal Pemantauan Status: 07-Jul-2025

Urutan Tidak Lajut: **Kurang**

Kegiatan intermediasi yang dilaksanakan setelah tanggal 3 Juni 2025 (terakhir Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan tanggal 7-5-Juni-2025)

Q LOG PERFORMANCE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

No	Detail Pelanggaran Publik	Waktu	Status	Penyedia	Penyedia	Status	Penyedia
5770	Detail Pelanggaran Publik	30-Jul-2025	M. Zaid Achyar	Ya	Bukti	Bukti Tidak Tersedia	Ya
5771	Laporan Intermediasi Balayay Pelayanan Publik Tahun 2023	07-Jul-2025	M. Zaid Achyar	Ya	Bukti	Bukti Tidak Tersedia	Ya
5771	Laporan Intermediasi Balayay Pelayanan Publik	07-Jul-2025	M. Zaid Achyar	Ya	Bukti	Bukti Tidak Tersedia	Ya

ATTENTIONS: Pastikan Nilai Temuan dan Nilai Balai Tidak Lajut yang di input secara akurat.

SISTEM INFORMASI DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERNI

LAPORAN KINERJA BKIPM - TRIWULAN II

https://idak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/akur/9/396/373/1317



Detail Report / Detail Temuan Hasil Pengawasan

ID LKP	3728	Mener Program: 5.142/71.640-181/05/2022
	Tanggal Program: 12 Jun 2022	
Garis Pengawasan Unit Regulasi	0014	Jenis Kelengkapan: 1. Rukonozandi
	Mika Kucenasari	
Unit Regulasi	0014	Mika Kucenasari

KODE TEMUAN 10974/03.03

Uraian
Uraian
Sisa Temuan
Tertutup

Deskripsi
Aspek pelayanan yang memuatlah perubahan dan langkah perbaikan, antara lain: a. Aspek Kelengkapan Pelayanan 1) Standar Pelayanan (SP) belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi dan penyesuaian; 2) Pelaksanaan Fungsi Kelembagaan Publik (PK) belum dilakukan dengan Baik; 3) Aspek Pemeliharaan SP sesuai Surat Keputusan Menteri dan SP Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan LKP di tingkat provinsi Persebar; 3) Pemeliharaan yang SP secara berkala belum terkoreksinya sesuai dengan hasil DSOA 4) Dalam hal ini pelaksanaan hasil DSOA dilaksanakan sesuai dengan 3) dan sesuai dengan DSOA tersebut. 5. Aspek Pemeliharaan SPM meliputi analisis penerapan hukum, pemenuhan penjaminan mutu layanan (LMD) yang pelayanan pada hari kerja dan pemenuhan waktu layanan (LMD) hari kerja sesuai nilai. c. Aspek Standar dan Prosedur Pelayanan Terpadu yang Terjalinnya jalan pada pemenuhan layanan publik di LKMD dan di tingkat lokal belum sepenuhnya dilakukan oleh unit pelayanan yang dilayani. d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik. Pemeliharaan data dan informasi pelayanan publik adalah land digital belum dilakukan secara total. e. Aspek Informasi Temuan DSOA sesuai temuan dalam antrian pelayanan secara daring, serta sesuai temuan dan masalah antara lain: pada tingkat lokal dilaksanakan dan dilaksanakan. (02.01.01) f. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik. Temuan informasi sistem pengelolaan sistem (SI) dilaksanakan sesuai dengan standar (SI) g. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik. SOP yang ada pada setiap tidak berjalan secara optimal atau tidak sesuai (SI).

ID	Uraian Kelengkapan	Nilai (Rp)	Tidak Lengkapi	Resiko	Aksi
2475	PI. Kapasite Doka KPM Semarang agar melakukan koordinasi secara berkala terhadap Sekelompok BYK/BKMP dalam rangka memastikan pemenuhan perijinan pelayanan publik, untuk memperoleh kelengkapan pelayanan prima	0	1) 20 Juni s.d. 4 Juli 2022 2) 16 Juni s.d. 4 Juli 2022	TERLUAS	Kolok Data
2477	PI. Kapasite Doka KPM Semarang agar melakukan pemenuhan terkait pemenuhan pelayanan prima kepada pelanggan baik melalui pemenuhan secara berkala maupun melakukan dalam lingkungan sekitar lokasi pelayanan publik	0	Aspek Kegiatan pemenuhan yang dilaksanakan sesuai tanggal 6 Juni 2022 (melalui Fasilitasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 2022)	PERLU	Kolok Data

https://idak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/akur/9/396/373/1217



Detail Report / Detail Temuan Hasil Pengawasan

ID LKP	3728	Mener Program: 5.142/71.640-181/05/2022
	Tanggal Program: 12 Jun 2022	
Garis Pengawasan Unit Regulasi	0014	Jenis Kelengkapan: 1. Rukonozandi
	Mika Kucenasari	
Unit Regulasi	0014	Mika Kucenasari

KODE TEMUAN 10974/03.03

Uraian
Uraian
Sisa Temuan
Tertutup

Deskripsi
Aspek pelayanan yang memuatlah perubahan dan langkah perbaikan, antara lain: a. Aspek Kelengkapan Pelayanan 1) Standar Pelayanan (SP) belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi dan penyesuaian; 2) Pelaksanaan Fungsi Kelembagaan Publik (PK) belum dilakukan dengan Baik; 3) Aspek Pemeliharaan SP sesuai Surat Keputusan Menteri dan SP Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan LKP di tingkat provinsi Persebar; 3) Pemeliharaan yang SP secara berkala belum terkoreksinya sesuai dengan hasil DSOA 4) Dalam hal ini pelaksanaan hasil DSOA dilaksanakan sesuai dengan 3) dan sesuai dengan DSOA tersebut. 5. Aspek Pemeliharaan SPM meliputi analisis penerapan hukum, pemenuhan penjaminan mutu layanan (LMD) yang pelayanan pada hari kerja dan pemenuhan waktu layanan (LMD) hari kerja sesuai nilai. c. Aspek Standar dan Prosedur Pelayanan Terpadu yang Terjalinnya jalan pada pemenuhan layanan publik di LKMD dan di tingkat lokal belum sepenuhnya dilakukan oleh unit pelayanan yang dilayani. d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik. Pemeliharaan data dan informasi pelayanan publik adalah land digital belum dilakukan secara total. e. Aspek Informasi Temuan DSOA sesuai temuan dalam antrian pelayanan secara daring, serta sesuai temuan dan masalah antara lain: pada tingkat lokal dilaksanakan dan dilaksanakan. (02.01.01) f. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik. Temuan informasi sistem pengelolaan sistem (SI) dilaksanakan sesuai dengan standar (SI) g. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik. SOP yang ada pada setiap tidak berjalan secara optimal atau tidak sesuai (SI).

ID	Uraian Kelengkapan	Nilai (Rp)	Tidak Lengkapi	Resiko	Aksi
2477	PI. Kapasite Doka KPM Semarang agar melakukan pemenuhan terkait pemenuhan pelayanan prima kepada pelanggan baik melalui pemenuhan secara berkala maupun melakukan dalam lingkungan sekitar lokasi pelayanan publik	0	Aspek Kegiatan pemenuhan yang dilaksanakan sesuai tanggal 6 Juni 2022 (melalui Fasilitasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 2022)	PERLU	Kolok Data
2478	PI. Kapasite Doka KPM Semarang agar meningkatkan kapasitas Tim Pelayanan Publik untuk meningkatkan kemampuan dan dalam meningkatkan kemampuan pelayanan prima dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya bagi aspek yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan prima	0	1) 20 Juni s.d. 4 Juli 2022 2) 16 Juni s.d. 4 Juli 2022	TERTUTUP	Kolok Data
2479	PI. Kapasite Doka KPM Semarang agar meningkatkan kapasitas Tim Pelayanan Publik untuk meningkatkan kemampuan dan dalam meningkatkan kemampuan pelayanan prima dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya bagi aspek yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan prima	0	1) 20 Juni s.d. 4 Juli 2022 2) 16 Juni s.d. 4 Juli 2022	TERTUTUP	Kolok Data
2480	PI. Kapasite Doka KPM Semarang agar meningkatkan kapasitas Tim Pelayanan Publik untuk meningkatkan kemampuan dan dalam meningkatkan kemampuan pelayanan prima dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya bagi aspek yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan prima	0	1) 20 Juni s.d. 4 Juli 2022 2) 16 Juni s.d. 4 Juli 2022	TERTUTUP	Kolok Data

https://idak.kkp.go.id/hasil-pengawasan-sajian-ku/9/396/temuan-halaman-spi

ID	SARAN PEMBERAN	Kategori	Status	Aksi
5274	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	1. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5277	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	2. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5279	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	3. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5274	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	1. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5275	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	2. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5276	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	3. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5277	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	4. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5278	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	5. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5279	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	6. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5280	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	7. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5281	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	8. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
5282	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	9. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
1287	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	10. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan
1297	BALAI KAWATIRAN BAK, PENGEDALIAN METU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBANGKUD	11. Pengawasan Paket Jasa Perawatan Ikan Dalam Budidaya (SMP) Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan) dan Pengawasan PPH (Pemeriksaan Kesehatan Ikan)	TERLUAS	0 Kolok Temuan

Dari tabel dan tampilan layar kegiatan diatas, terdapat 5 rekomendasi yang telah diberikan dan dituangkan dalam aplikasi *sidak.kkp.go.id* dan keseluruhan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan status TUNTAS dan PENDING sehingga capaian Indikator Kinerja ini sebesar 97.92.

IK 13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Tabel 9. Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan II Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahun nan		
Target	76	76	76	0	0	0	0		76
Realisasi	99.06	100	100	0	0	0	0		
% Capaian	120	120	120	0	0	0	0		

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Pada Bulan April 2025 dilakukan penyesuaian data RUP dengan membandingkan kertas kerja dari Biro Umum dan PBJ KKP dengan RUP terumumkan pada aplikasi SiRUP. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi paket-paket PBJ terumumkan terkena efisiensi atau tidak. Selanjutnya dilakukan revisi RUP untuk paket-paket PBJ yang terkena efisiensi dan mengumumkan paket-paket PBJ yang tidak terkena efisiensi pada aplikasi SiRUP. Hasil yang didapatkan adalah kesesuaian antara Pagu PBJ dengan Pagu PBJ terumumkan SiRUP. Menindaklanjuti hal tersebut BPPMHKP Semarang telah mengirimkan Kertas Kerja dan Rekapitulasi RUP ke Biro Umum dan PBJ KKP tanggal 11 April 2025 dengan RUP terumumkan Rp. 1.190.430.000,- (*terlampir*).

Pada Bulan Mei 2025 terdapat penyesuaian RUP terkait dengan adanya paket PBJ yang tidak terkena efisiensi, sehingga BPPMHKP Semarang melaksanakan revisi RUP terumumkan dengan Nilai Rp. 1.451.630,00 (*terlampir*).

Berikut data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang

diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025 pada setiap Unit Eselon 1;

Kode Eselon 1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumuman				% Target IKU TW 2	% Capaian Target IKU TW 2	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumuman	Selaih	Keterangan			
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	42,481,346,722	42,481,346,722	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektoral Jenderal	1	5,933,654,000	5,933,654,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	31,003,797,075	31,003,797,075	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	233,805,135,000	233,805,135,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	312,817,524,500	312,817,524,500	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	334,777,219,000	334,777,219,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	41	162,785,749,168	162,785,749,168	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	1,978,583,640,800	1,975,572,149,800	(3,011,491,000)	Kurang Terumuman	76.00%	99.65%	Melebihi Target
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,022,674,212,069	1,029,924,292,069	7,250,080,000	Lebih Terumuman	76.00%	99.29%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel penilaian diatas, maka capaian kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%) Balai KIPM Semarang mengacu pada nilai eselon 2 BPPMHKP sebesar 100 %.

IK 16. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)

Tabel 10. Target dan Realisasi IK 16 pada Triwulan II Tahun 2025

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	TW1	TW2	Sm.I	TW3	s.d TW3	TW4	Tahunan		
Target	88	88	88	0	0	0	0		88
Realisasi	94,67	90,84	90,84	0	0	0	0		
% Capaian	107,58	103,23	103,23	0	0	0	0		

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dari Unit Pelayanan Publik.

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir pada laporan kegiatan).

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/3> (Diisi sesuai link kuesioner SKM UPP BPPMHKP) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 87 orang responden, dengan pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh

hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,66	3,66	3,64	3,68	3,64	3,55	3,57	3,69	3,61
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,84 (A atau Sangat Baik)								

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25.

Grafik Nilai SKM Per Unsur



Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 90,84 Kemudian nilai SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Semarang menunjukkan sedikit penurunan (Triwulan 2 2025 nilai SKM 90,84) konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan 1 2025 hingga triwulan 2 2025.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi Pelaksana, Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan dan Persyaratan.
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kesesuaian Produk Pelayanan dengan Ketentuan, Biaya/Tarif, dan Pengaduan Pelayanan.

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Semarang pada Triwulan II tahun anggaran (T.A) 2025 adalah Rp 7,098,970,000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 6,866,130,000,- dan PNBPN sebesar Rp 232,840,000,-.

Pada triwulan II 2025, realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Semarang mencapai Rp 1,710,776,388,- atau sebesar 24,10%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Semarang T.A 2025 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12

Tabel 11. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja s.d. Triwulan II 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d TW II	%
1	Belanja Pegawai	3,785,436,000	2,360,876,384	62,37%
2	Belanja Barang	3,313,534,000	777,992,326	23,48%
3	Belanja Modal	0	0	0%
	TOTAL	7,098,970,000	3,138,868,710	44,22%%

Tabel 12. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan s.d. Triwulan II 2025

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi s.d. TW II	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	6,550,970,000	3,107,947,997	47,44
2	Pengendalian Mutu	400,000,000	0	0
3	Manajemen Mutu	148,000,000	30,920,713	20,89
	TOTAL	7,098,970,000	3,138,868,710	44,22

BAB 3

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Semarang Triwulan II 2025 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Balai KIPM Semarang pada periode kedua tahun anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Terhadap capaian IKU dan IKM tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU dan IKM Balai KIPM Semarang yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TAMBOR NO.108 16
 JAKARTA 10110, KOTA POS 4130, KP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id/

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwan**
 Jabatan : **Pit. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik
Ishartini

Pihak Pertama
 Pit. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang



Ditandatangani Secara Elektronik
Sarwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SEMARANG

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	70
	2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	70
	3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	1
	4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	90
SK.2 Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	75
	6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	75
SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	92
	8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	71,5
	9. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	100
	10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Indeks)	87
	11. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	86
	12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimantapkan untuk Perubahan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	85
	13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	78
	14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	75

	15.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	1
	16.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.550.970.000
2.	Manajemen Mutu	148.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	400.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Semarang Tahun 2025		7.098.970.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
 Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik
Ishartini

Pihak Pertama
 Pit. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang



Ditandatangani Secara Elektronik
Sarwan

